

## **Perlu Kerja Sistemik Demi Mewujudkan Swasembada Pangan**

<http://news.ipb.ac.id>

Diposting oleh admin pada tanggal 29 May 2013

Untuk mewujudkan swasembada pangan diperlukan kerjasama sistemik demi mewujudkan swasembada pangan. Hal ini disampaikan Peneliti Utama Badan Koordinasi Survei & Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), Prof. Ing. H. Fahmi Amhar, Ph.D dalam acara Seminar Islam dan Peradaban yang diselenggarakan Badan Kerohanian Islam Mahasiswa, Institut Pertanian Bogor (BKIM-IPB), Minggu (19/5) di Kampus IPB Darmaga. "Pertanian membutuhkan lahan, air, dan infrastruktur. Tanpa lahan di mana kita menanam? Tanpa air tidak ada kehidupan. Dan tanpa infrastruktur seperti jalan atau pasar, hasil panen sulit dijual. Dan keseluruhan aspek ini karena menyangkut ruang, diatur dalam UU 24 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Tanpa wawasan pertanian yang cukup, dapat saja di era otonomi daerah ini seorang gubernur atau bupati mengalokasikan suatu ruang untuk peruntukan yang tidak ramah pertanian atau bahkan rajin menukar peruntukan dari sektor pertanian ke sektor yang lebih komersil, misalnya real estat atau industri," papar Prof.Fahmi.

Menurut Prof. Fahmi, masalah lahan juga masalah pertanahan. Sebagian besar petani kita adalah petani penggarap yang tidak punya tanah, atau memiliki lahan sangat sempit atau marginal yang tidak mencukupi untuk menopang kehidupannya. "Ada UU Pokok Agraria, namun UU ini kini terdesak dengan UU Penanaman Modal yang membolehkan investor asing mendirikan usaha dengan memperoleh Hak Guna Usaha hingga 95 tahun," lanjutnya.

Pertanian juga membutuhkan sumber daya manusia (SDM). Merekalah yang akan bertani dan membutuhkan teknologi. Pertanian juga membutuhkan teknologi. Teknologi ini mulai dari teknik persiapan lahan, perbenihan, perpupukan, pemberantasan hama, pascapanen (pergudangan, pengemasan) hingga teknologi untuk mengetahui perkembangan pasar maupun teknologi pertanian itu sendiri, yaitu e-agro. "Namun semua teknologi ini jika tidak cerdas, kemungkinan juga sulit digunakan karena dilindungi UU Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," katanya.

Dan terakhir tak kalah pentingnya adalah Sosial Ekonomi. Ekonomi Pertanian harus dipandang sebagai rantai pasokan (Supply Chain). Tanpa kontrak supply chain dari petani ke end-user, pola tanam petani tidak sustainable (berkesinambungan), sehingga harga pun dapat mudah dimainkan, baik di pasar tradisional maupun di Bursa Komoditas Berjangka. Masalah sosial ekonomi juga menyangkut persoalan kredit pembiayaan, masalah bea masuk, peran Bulog dan sebagainya. Dari sisi pemerintah, distribusi hasil pertanian semestinya juga dapat dimonitor ke seluruh Indonesia. Dari sini tampak bahwa keberhasilan pertanian adalah buah sinergi dari berbagai struktur yang lain. Demikian pula kegagalannya adalah buah dari kegagalan berbagai sistem yang lain.

Kegiatan yang menghadirkan Wakil Dekan Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (FEMA-IPB), Prof.Ahmad Sulaeman, Pakar Ekonomi Syariah, Dr. Arim Nasim ini di buka oleh Menteri Pertanian Indonesia Periode 2004-2009. (ris)

